

Kejelasan Sasaran Anggaran pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Survey pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

Wahyu

Email : wahyu_stiem@gmail.com

Mahasiswa Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM Bongaya)
Makassar, Indonesia

Corresponding Author:

Nama author: Wahyu. HP : 081345251115

e-mail:wahyu_stiem@gmail.com

*Received: 03 Desember 2024, Revised:06 Januari 2025, Accepted: 15 Februari 2025:
Published:28 Februari 2025*

Abstract. *Abstract. This study aims to analyze the effect of the clarity of budget targets on the accountability of the performance of government agencies. The survey was conducted in 16 Regional Apparatus Organizations (OPD) in the form of Agencies in Gowa Regency with 45 respondents/samples. The data collection technique used questionnaires and data analysis used regression analysis techniques. The results of the study show that the clarity of budget targets does not affect the accountability of the performance of government agencies. This means that the clarity of budget targets is not the benchmark in determining the quality of a government agency accountability report.*

Keywords: *Budget characteristics, Clarity of budget targets, Accountability of government agency performance*

Absrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Survey dilakukan di 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbentuk Dinas di Kabupaten Gowa dengan 45 jumlah responden/sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan teknik analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti kejelasan sasaran anggaran bukan yang menjadi tolak ukur dalam menentukan kualitas sebuah laporan akuntabilitas instansi pemerintah.

Kata Kunci : **Karakteristik anggaran, Kejelasan sasaran anggaran, Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

I. PENDAHULUAN

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya, Herawaty(2011). Penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu hal

yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Fenomena akhir-akhir ini, terdapat banyak penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran di suatu instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah dan sistem pelaporan yang kurang efektif kerap terjadi dan muncul kepermukaan sehingga masyarakat seringkali mempertanyakan kinerja pemimpin daerah.

Lingkup pemerintahan daerah anggaran menjadi relevan dan penting, hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintahan. Menurut Ridwan dan Putra (2016) anggaran merupakan sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar menejer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan kegiatan yang terdiri dari sejumlah terget yang akan dicapai oleh manajer departemen suatu perusahaan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan datang. Peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintah daerah terutama dalam akuntabilitasnya. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Tidak hanya itu, anggaran merupakan dokumen antara pemerintah dan DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002:66). Menurut Kenis (1979) terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharono & Solichin, 2006). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti (Suhartono & Mochammad, 2006).

II. TINJAUAN TEORITIS

1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerbility*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah (Djalil, 2014: 63).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam prosesnya mencakup hal-hal berikut : (a) rencana strategis, (b) perjanjian kinerja, (c) pengukuran kinerja, (d) pengelolaan data kinerja, (e) pelaporan kinerja, dan (f) tata cara reuiu atas laporan kinerja. Secara umum, pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan/kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan/kebijakan. Berikut tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi, 2011), yaitu; (a) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, (b) menyediakan sarana pembelajaran pegawai , (c) memperbaiki kinerja Periode-periode

berikutnya, (d) memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), (e) pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan reward (misalnya: kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi) atau punishment (misalnya: pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran), (f) motivasi pegawai, (g) menciptakan akuntabilitas

2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks Pemerintah Daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat (Hidayattullah & Herdjiono, 2014).

Menurut Bulan (2011) menyatakan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Tujuan dan sasaran APBD harus disesuaikan dengan lima kriteria sebagai berikut: (a) Spesifik. Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya. (b) Terukur. Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya. (c) Menantang tapi realistis. Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai. (d) Berorientasi pada hasil akhir. Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya. (e) Memiliki batas waktu. Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Syafrial, 2011)

III. METODOLOGI

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono(2008) pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbentuk Dinas di Kabupaten Gowa yang berjumlah 16 Dinas dengan jumlah

responden sebanyak 45 responden/sampel. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner berganda dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Adapun Daftar Dinas dan Jumlah Responden/Sampel dapat disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 : Daftar Dinas dan Jumlah Responden/Sampel

No	Nama Dinas	Jumlah Responden
1	Dinas Sosial	3
2	Dinas Pendidikan dan Olahraga	3
3	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	2
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2
7	Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah	3
8	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	3
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3
11	Dinas Pertanian	3
12	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan	3
13	Dinas Pemadam Kebakaran	2
14	Dinas Kesehatan	3
15	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3
16	Dinas Pekerjaan Umum	3
Total		45

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan dipemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dilakukan terhadap 45 responden yang telah dipenuhi kriterianya untuk diolah lebih lanjut. Pengukuran statistik sampel yang sangat berguna untuk tujuan penarikan kesimpulan ialah pengukuran tentang tendensi sentral dari serangkaian data sampel. Pengukuran ini umumnya dibutuhkan karena mampu menggambarkan pemusatan nilai-nilai observasi sampel sehingga mempermudah pengamatan. Melalui hasil perhitungan nilai-nilai tendensi sentral tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai sampel secara garis besar. Sehingga dapat mendekati kebenaran data. Pengukuran statistik sampel dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 22 dengan hasil berikut ini.

Tabel 2 : Hasil Analisis Deskriptif

	N	Mean	Median	Modus	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran	45	3.434	5.0000	5.00	0.584
Akuntabilitas Kinerja	45	3.496	5.0000	5.00	0.536

Hasil dari tabel diatas menunjukkan jumlah responden (N) adalah 45. Dari 45 responden ini, diketahui variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai Mean adalah 3.43, nilai median 5.0,

Modus 5.0 dan Standar Deviasi 0.58. Selanjutnya variabel akuntabilitas kinerja memiliki nilai Mean adalah 3.4, nilai median 5.0, Modus 5.0 dan Standar Deviasi 0.53.

Analisis statistik inferensial dalam penelitian ini adalah analisis regresi yakni analisis yang didasari adanya hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisisnya sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut ini

Tabel 3 : Hasil Analisis Koofisen Regresi

Model	Koofisien Regresi (B)	Standar Error	T hitung	Prob
Kontanta	21.128	4.372	4.833	.000
Kejelasan Sasaran Annggaran	.144	.203	.709	.482
Variabel independen :	Akuntabilitas kinerja			

Berdasarkan analisis data pada tabel 3 tersebut maka diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 21.128 + 0.144X + \varepsilon$$

Hasil persamaan tersebut memperlihatkan hubungan antara variabel *independen* dengan variabel *dependen* dapat dijelaskan bahwa : Nilai konstanta adalah 21.128, artinya jika tidak terjadi perubahan variabel kejelasan sasaran anggaran maka nilai akuntabilitas kinerja sebesar 21.128 %. Nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran bertanda positif sebesar 0.144 artinya jika variabel kejelasan sasaran anggaran meningkat 1% maka Akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa bertambah 0.144. Nilai probabilitas sebesar 0,482 lebih besar dari 0,05 artinya tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis penelitian ditolak. Sehingga hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Gowa.

IV. PEMBAHASAN

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran bukan yang menjadi tolak ukur dalam menentukan kualitas sebuah laporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan banyak faktor-faktor yang lebih dominan untuk menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan secara individu mayoritas responden pada instansi OPD Pemerintah Gowa yang masih belum sepenuhnya paham dengan kejelasan sasaran anggaran untuk meningkatkan AKIP pemerintah Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nety Herawaty (2011) yang dilakukan pada pemerintah daerah kota Jamb dan penelitian dari Rio Pratama dkk (2019) di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, tidak selaras penelitian yang dilakukan oleh Yulia Cantika (2018) pada instansi pemerintah Kab. Polewali Mandar juga oleh Siti Ruri Suhaesti (2016) pada instansi pemerintah Kabupaten Bengkalis. Hasil kedua penelitian tersebut menunjukan kejelasan sasarn anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabiliras kinerja Insatansi pemerintah. Pencapaian kinerja bisa pula terkait dengan motivasi, dimana hal ini disebabkan dengan motivasi yang tinggi akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

V. KESIMPULAN

Peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintah daerah terutama dalam akuntabilitasnya. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti kejelasan sasaran anggaran bukan yang menjadi tolak ukur dalam menentukan kualitas sebuah laporan akuntabilitas instansi pemerintah.

REFERENSI

- Deddi Nordiawan & Ayuningtyan Hertianti, (2018) Akuntansi Sektor Publik, Edisi Dua, Jakarta : Salemba Empat
- Eko Setiawan. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, pengendalian Akuntansi dan sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Jurnal ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi : Universitas Riau.
- Hasma, Pemkab Gowa Terus Tingkat Kualitas SAKIP Menuju BB, Melalui <www.gowakab.go.id/pemkab-gowa-terus-tingkat-kualitas-sakip-menuju-bb>(20 april 2021)
- Reyhan Hadi Fauzan,(2017), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas
- Rio Pratama dkk, (2019), Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Siti Ruru Suhaesti. (2016). Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Kabupaten Bengkalis). Fakultas Ekonomi : Riau University
- Wahid, Imam. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja 116 Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agama). JOM Fekon. 3(1): 2457-2471.
- Yulia Cantika, (2019), Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru), Skripsi, Makassar : Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin.
- Zakiyudin, M. Ali dan Suyanto. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP. 2(1): 89-96.